

# **Daya Juang dan Daya Tangguh Politisi Perempuan dalam Pemenangan Pemilu (Studi Kasus Keterpilihan Tiga Periode Politisi Partai Amanat Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah)**

**Muhammad Akbar Rafsanjani\*), Fitriyah\*\*), Nur Hidayat Sardini\*\*)**

Email : [akbarraf19@gmail.com](mailto:akbarraf19@gmail.com)

**Departemen Politik dan Pemerintahan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jl.Prof.H.Soedarto,SH Tembalang Semarang, Kode Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRAK**

Pemahaman hak asasi perempuan yang meluas pada era sekarang menuntut adanya kesetaraan gender di semua aspek. Upaya untuk mendukung terciptanya kesetaraan gender di tengah masyarakat Indonesia dapat diwujudkan melalui kehadiran figur perempuan yang menempati kedudukan strategis di lingkup jabatan publik baik di ranah eksekutif, legislatif maupun pada ranah yudikatif. Hadirnya figur perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah merupakan hasil dari kebijakan afirmasi pemberian kuota perempuan sebanyak 30% kursi di parlemen. Pada periode 2019, kuota yang tersedia hanya dapat terpenuhi sebanyak 20% di tingkat nasional dan secara umum angkanya lebih rendah pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota. Hadirnya figur perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah menciptakan rasa keterwakilan dari para perempuan yang ada di Provinsi Jawa Tengah karena dengan hadirnya figur politisi perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi pihak perwakilan yang paling mengerti mengenai aspirasi, ide maupun isu spesifik perempuan. Salah satu figur perempuan di Provinsi Jawa Tengah yang sukses bertahan selama tiga periode sebagai anggota DPRD Jawa Tengah adalah Sri Marnyuni, pada saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi B di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dalam penelitian adalah untuk menganalisis kapitalisasi strategi modalitas dalam merawat suara konstituen dalam keterpilihan Sri Marnyuni hingga tiga periode di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Penelitian menggunakan Teori Modalitas oleh Bourdieu (1986) dan Teori Strategi Keterpilihan Petahana oleh Sheth dan Frazier (1982) dengan melihat peranan partai politik sebagai bagian proses dalam pemenangan pemilu. Pada penelitian ini akan menggunakan metode penelitian berupa deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menemukan modal sosial sebagai modal kuat yang dimiliki Sri Marnyuni sebagai faktor yang paling berpengaruh terhadap keterpilihan Sri Marnyuni di DPRD Provinsi Jawa Tengah selama 3 periode.

**Kata Kunci :** kesetaraan gender, figur perempuan, keterwakilan, Sri Marnyuni

## **ABSTRACT**

*The widespread understanding of women's human rights in the current era demands gender equality in all aspects. Efforts to support the creation of gender equality in Indonesian society can be realized through the presence of female figures who occupy strategic positions in the sphere of public office in both the executive, legislative and judicial domains. The presence of female figures in the Regional People's Representative Council of Central Java Province is the result of the affirmative policy of granting a quota of women as much as 30% of seats in parliament. In the 2019 period, the available quota can only be fulfilled by 20% at the national level and in general the figure is lower at the provincial and district/city levels. The presence of female figures in the Regional People's Representative Council of Central Java Province creates a sense of representation of women in Central Java Province because the presence of female politician figures in the Regional People's Representative Council of Central Java Province can become the representative party who best understands women's specific aspirations, ideas and issues. One of the female figures in Central Java Province who has successfully survived for three terms as a member of Regional People's Representative Council of Central Java Province is Sri Marnyuni, currently serving as Deputy Chairperson of Commission B in the Regional People's Representative Council of Central Java Province. The aim of this research is to analyze the capitalization of the modality strategy in caring for constituent votes in Sri Marnyuni's election for up to three terms in the Regional People's Representative Council of Central Java Province. The study uses the Modality Theory by Bourdieu (1986) and the Incumbent Election Strategy Theory by Sheth and Frazier (1982) by looking at the role of political parties as part of the process in winning elections. In this study will use a research method in the form of descriptive qualitative. This study used interview techniques and literature study as data collection techniques. The results of the study found that social capital as a strong capital owned by Sri Marnyuni was the factor that most influenced Sri Marnyuni's election in the Regional People's Representative Council of Central Java Province for 3 periods.*

**Keywords :** *gender equality, female figures, representation, Sri Marnyuni*

*\*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

*\*\*\*) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

## PENDAHULUAN

Pemahaman hak asasi perempuan yang meluas pada era sekarang menuntut adanya kesetaraan gender di semua aspek. Masyarakat Indonesia memiliki budaya patriarki yang sudah mengakar dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan di Indonesia. Upaya untuk mendukung terciptanya kesetaraan gender di tengah masyarakat Indonesia dapat diwujudkan melalui kehadiran figur perempuan yang menempati kedudukan strategis di lingkup jabatan publik baik di ranah eksekutif, legislatif maupun pada ranah yudikatif (Phillips, 1995). Pembahasan pada penelitian ini mengenai daya juang dan daya tangguh politisi perempuan dalam kemenangan Pemilihan Umum (Pemilu) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah. Pada Pemilu 2019 sebanyak 19,2% caleg perempuan terpilih menjadi anggota legislatif di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Artikel Sweinstani (2023) memaparkan keterwakilan perempuan dalam politik merupakan sebuah gambaran dari negara yang mengakui eksistensi perempuan dan juga keadilan dari negara tersebut (Phillips, 1995). Temuan lain menjelaskan terlibatnya perempuan dalam partisipasi politik secara aktif dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap politik di kalangan perempuan. Hadirnya figur perempuan dalam politik akan menjadi panutan bagi perempuan lainnya dan hal tersebut merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran bahwa kehadiran perempuan di dalam politik itu menjadi hal yang penting (Sweinstani, 2023). Hadirnya figur perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah menciptakan rasa keterwakilan dari para perempuan yang ada di Provinsi Jawa Tengah karena dengan hadirnya figur politisi perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi pihak

perwakilan yang paling mengerti mengenai aspirasi, ide maupun isu spesifik perempuan. Para perempuan yang ada di Provinsi Jawa Tengah dapat berharap setiap aspirasi, ide maupun isu spesifik perempuan dapat tersampaikan melalui figur perempuan yang duduk di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hadirnya keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah menciptakan lingkungan politik yang ramah gender.

Hadirnya figur perempuan di DPRD Provinsi Jawa Tengah merupakan hasil dari kebijakan afirmasi pemberian kuota perempuan sebanyak 30% kursi di parlemen. Pada periode 2019, kuota yang tersedia hanya dapat terpenuhi sebanyak 20% di tingkat nasional dan secara umum angkanya lebih rendah pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, namun angka kehadiran perempuan di lembaga legislatif menunjukkan tren yang meningkat dari periode sebelumnya. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan tercipta sebuah peningkatan lingkungan politik yang ramah gender.

Pada Pemilu 2019 sebanyak 22 perempuan terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Terdapat tujuh anggota DPRD perempuan Provinsi Jawa Tengah yang terpilih selama tiga periode. Salah satu figur perempuan di Provinsi Jawa Tengah yang sukses bertahan selama tiga periode sebagai anggota DPRD Jawa Tengah adalah Sri Marnyuni, pada saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi B di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sri Marnyuni merupakan petahana yang terpilih selama tiga periode berturut-turut, yakni pada Pemilu 2009, Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Sri Marnyuni berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN). Sri Marnyuni merupakan perwakilan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah 7 yang

meliputi Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Surakarta<sup>1</sup>.

Selain Sri Marnyuni yang mampu bertahan selama tiga periode, terdapat lima perempuan kader PDIP dan satu perempuan kader PKB. PDIP dan PKB merupakan partai politik dengan perolehan kursi peringkat 1 dan 2 di DPRD Provinsi Jawa Tengah dan tren perolehan kursinya meningkat. Hal menarik pada kasus Sri Marnyuni adalah keterpilihan Sri Marnyuni selama tiga periode berturut-turut melalui partai politik yang elektabilitasnya mengalami penurunan yakni PAN. Pada Pemilu 2019, PAN hanya mendapatkan 6 kursi (5%) dari total 120 kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Angka tersebut turun dibandingkan Pemilu 2014, PAN berhasil mendapatkan 8 kursi (8%) dan Pemilu 2009 mendapatkan 10 kursi (10%) dari total 100 kursi DPRD Jawa Tengah. Selama tiga periode tersebut Sri Marnyuni menjadi satu-satunya perempuan anggota DPRD Jawa Tengah dari PAN dan satu-satunya wakil PAN di daerah pemilihannya. Tren penurunan elektabilitas PAN di Pemilu DPRD Provinsi Jawa Tengah tidak berpengaruh terhadap keterpilihan Sri Marnyuni di DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan perolehan suara yang relatif stabil. Pada Pemilu 2014 perolehan suara Sri Maryuni sebesar 26.177 suara dan pada Pemilu 2019 sebesar 27.617 suara.

Berdasarkan temuan Kusuma (2022) menyatakan data hasil Pemilu yang diolah dan dirilis oleh Cakra Wikara Indonesia (CWI) menunjukkan posisi nomor urut 1 sangat memengaruhi keterpilihan calon legislatif dan penentuan

nomor urut calon dalam daftar calon masih ditentukan oleh segelintir elit partai. Pada Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, Sri Marnyuni mendapatkan nomor urut 2 namun hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterpilihan Sri Marnyuni.

Terdapat penelitian terdahulu yang menjelaskan beberapa faktor yang dapat mendukung seorang calon terpilih pada setiap kontestasi pemilu, yakni kuat-lemahnya kepemilikan modal ekonomi, modal sosial, dan modal politik atau faktor modalitas baik secara kumulatif ataupun setidaknya salah satunya (Indira dan Mariyah, 2021; Gelgel dan Apriani, 2019). Studi Fitriyah dan Supratiwi (2015) menemukan faktor kekerabatan berperan dalam penguatan faktor modalitas, dan temuan Dalo (2010) menyatakan bahwa kemampuan mengkapitalisasi modalitas mengantarkan keterpilihan perempuan, sehingga permasalahan keterbatasan modalitas bukan menjadi permasalahan bagi setiap kandidat politik untuk memenangkan sebuah kompetisi elektoral.

Penelitian ini akan mencari faktor modalitas yang berperan pada kasus Sri Marnyuni terpilih selama tiga periode berturut-turut. Studi keterpilihan perempuan petahana untuk tiga periode sudah dilakukan oleh Muzadi dan Fitriyah (2020), namun kasusnya di tingkat kota. Studi tersebut menemukan keterpilihan berulang karena petahana mampu merawat konstituen melalui kerja tim sukses yang loyal. Keterpilihan caleg perempuan petahana untuk tingkat kabupaten juga menjadi studi Maharani, dkk (2020).

---

<sup>1</sup> Pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 Sri Maryuni mewakili Dapil 5 yang merupakan gabungan dari Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali. Pada Pemilu 2019 ada penataan Dapil menjadi Dapil 7 gabungan dari

Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kota Surakarta. Sedangkan Kabupaten Boyolali masuk Dapil 8 bersama Kabupaten Magelang dan Kota Magelang.

Peneliti melihat urgensi penelitian serupa untuk caleg petahana di tingkat provinsi yang belum dilakukan. Pada tingkat provinsi tantangan yang dihadapi seorang calon lebih tinggi. Lingkup daerah pemilihan untuk Pemilu DPRD provinsi adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota, sementara untuk tingkat DPRD kabupaten kota adalah kecamatan/gabungan kecamatan. Hal ini berdampak pada jumlah pemilih dan rentetan tantangan lainnya, seperti kebutuhan makin besarnya keanggotaan tim sukses dan pembiayaan yang dibutuhkan.

### **TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kapitalisasi strategi modalitas dalam merawat suara konstituen dalam keterpilihan Sri Marnyuni hingga tiga periode di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

### **KERANGKA TEORI**

#### **Peran Partai Politik dalam Rekrutmen Politik Perempuan**

Rekrutmen politik dapat didefinisikan sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh partai politik dengan tujuan untuk mencari kader-kader baru dan juga mencari sosok yang dinilai mempunyai potensi kuat untuk ikut dalam proses kontestasi politik. Partai politik tidak hanya sekedar mencari kader dan juga sosok untuk ikut di dalam kontestasi politik, namun partai politik juga melakukan kegiatan pencalonan anggota politik untuk masuk ke dalam sistem politik melalui tahapan pemilihan, seleksi, dan pengangkatan anggota partai politik (Fitriyah, 2020). Pippa Noris (Katz dan Crotty, 2006) menyatakan bahwa dalam proses rekrutmen politik, di proses internal partai politik terdapat empat hal yang perlu diidentifikasi untuk menentukan calon tersebut, yakni:

1. Siapa calon yang dapat dikandidatkan?
2. Siapa yang melakukan seleksi?
3. Dimana calon diseleksi?
4. Bagaimana seorang calon dapat diputuskan?

Rekrutmen perempuan merupakan bagian dari rekrutmen politik yang dilakukan oleh partai politik. Menurut Phillips (1995) menyatakan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam sudut pandang yang sudah berkembang di masyarakat tidak hanya sekedar gagasan-gagasan yang muncul dari para kaum perempuan, namun juga berkaitan dengan sosok yang mewakili. Rekrutmen perempuan merupakan salah satu upaya untuk membentuk dan memperjuangkan lingkungan politik yang ramah bagi para kaum perempuan (Subono, 2012). Teori rekrutmen perempuan (Matland, 2002) menyatakan dalam proses rekrutmen yang harus dilalui oleh perempuan untuk masuk ke dalam ranah legislatif yakni perempuan perlu melewati tiga tantangan krusial terlebih dahulu yakni perempuan perlu menyeleksi dirinya sendiri, lalu diseleksi oleh partai sebagai kandidat dan diseleksi oleh pemilih. Sweinstani (2023) menyatakan banyak partai politik yang memasang perangkat maskulinitas kepada perempuan hal tersebut menjadi hambatan bagi perempuan untuk terjun ke dalam politik. Partai politik seringkali menciptakan kondisi akses *resources* kekuasaan perempuan menjadi terbatas. Hal tersebut menjadi kontradiksi di dalam praktik politik negara yang mana negara memberikan kebijakan afirmasi dalam politik sebagai urgensi yang penting, namun partai politik sebagai gerbang utama di dunia politik menciptakan hambatan itu sendiri. Pada konteks rekrutmen

perempuan, Sweinstani (2023) menyatakan kerap dijumpai kondisi tidak adanya calon perempuan yang diusung oleh partai politik yang disebabkan tidak tersedianya calon perempuan. Padahal, sudah menjadi tanggung jawab partai politik dalam membentuk kader perempuan yang sesuai dengan kriteria partai politik. Menggunakan konsep proses *supply* dan *demand*, partai politik perlu membentuk kualitas kader perempuan (*supply*) sesuai dengan apa yang diinginkan dari para pemilih (*demand*). Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh partai politik yakni dengan (1) memberikan *treatment by pass* kepada calon perempuan pada tahap mekanisme perekrutan caleg, (2) memberikan dana khusus untuk pendidikan politik perempuan dan, (3) melakukan *voluntary women quota*.

Berdasarkan empat isu dalam mekanisme rekrutmen politik diinternal partai politik, maka partai politik memainkan peran strategis dalam pencalonan perempuan, yakni apakah partai politik memutuskan mencalonkan perempuan pada nomor urut berapa dan daerah pemilihan apa. Undang-undang Pemilu di Indonesia mengatur kebijakan afirmasi melalui kuota 30% dalam pencalonan dan susunan nomor urut setiap tiga nama calon sekurang-kurangnya terdapat satu calon perempuan. Perintah undang-undang adalah bentuk kuota legal, sedangkan keputusan partai dalam pencalonan perempuan tergantung pada adanya kebijakan afirmasi bersifat sukarela kepada perempuan. Surbakti (2007) menyatakan keuntungan mencalonkan perempuan, menurutnya adanya dukungan massa dari para kaum perempuan terhadap satu partai politik tertentu dapat tercipta karena (1) terdapat upaya dari para petinggi partai untuk menciptakan hubungan

harmonis dengan para kaum perempuan, (2) banyak program yang dibentuk partai politik sesuai dengan kebutuhan dari para kaum perempuan, sehingga para petinggi partai politik dapat memberikan gambaran mengenai masa depan terhadap perempuan dapat tersampaikan melalui partai tersebut, dan partai politik dapat mengangkat isu gender yang sesuai di tengah masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Matland (2002), dalam rekrutmen politik juga ada ruang pemilih. Pemilih berperan dalam menentukan siapa yang akan memenangkan pemilu legislatif. Dalam sistem pemilu proporsional daftar terbuka maka kerja politik untuk memobilisasi suara pemilih berada dipundak calon, bukan lagi oleh partai politik seperti halnya dalam sistem pemilu proposional daftar tertutup. Fenomena ini disebut *personal vote* (Mellaz, 2018), yakni pemilih memilih calon bukan pilih partai sehingga kerja elektoral melekat pada calon yang bersangkutan.

Pada sistem ini penguasaan modalitas calon menjadi faktor penting. Ada banyak penjas tentang jenis-jenis modalitas dalam kontestasi elektoral. Marijan (2006) menggolongkannya atas tiga jenis modalitas, yakni modal politik, modal sosial dan modal ekonomi. Adanya dukungan partai politik dalam pencalonan seperti posisi nomor urut dalam daftar calon serta maju dari dapil yang menjadi potensi lumbung suara calon adalah bagian dari modal politik seorang kandidat.

### **Modal Ekonomi, Modal Budaya, dan Modal Sosial dalam Pemilu**

Modal menurut Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1986) adalah kumpulan sumber kekuatan dan kekuasaan yang digunakan sebagai dasar posisi dalam masyarakat yang dimiliki oleh seseorang untuk menentukan keanggotaannya di dalam kelas sosial

masyarakat. Terdapat tiga jenis modal, modal ekonomi, modal budaya, dan modal sosial. Pengertian lebih lanjut mengenai modal ekonomi sendiri diungkapkan oleh Field (2003) menjelaskan bahwa modal ekonomi lebih mengarah pada kekuatan finansial yang dimiliki oleh setiap kandidat yang akan terjun dalam sebuah kontestasi politik. Field (2003) juga menyatakan modal ekonomi merupakan akar dari seluruh modal dalam kontestasi politik. Modal ekonomi merupakan modal utama yang perlu dimiliki oleh para kandidat kontestasi politik dan juga sebagai modal yang paling mengakar dengan modal-modal yang lainnya. Modal ekonomi menjadi kekuatan yang paling utama di dalam kontestasi politik, namun setiap kandidat kontestasi politik perlu mempunyai modal budaya yang kuat seperti halnya bagaimana seorang kandidat tersebut berbicara. Modal budaya menurut Bourdieu (Pantouw, 2012) terdapat rentangan luas properti seperti seni, pendidikan, dan bentuk-bentuk bahasa. Masyarakat akan menilai gaya bicara dari setiap masing-masing kandidat yang mengikuti kontestasi politik, masyarakat juga akan menilai *attitude* dari setiap calon kandidat sehingga bila terdapat salah satu kandidat yang mengikuti kontesasi politik bersikap kurang baik di depan publik, maka hal tersebut menjadi blunder yang dilakukan oleh kandidat tersebut dan menyebabkan melemahnya modal budaya kandidat tersebut. Modal budaya memiliki banyak aspek di dalamnya sebagai hal yang akan dinilai oleh masyarakat seperti gaya bicara, *attitude*, pengetahuan, ijazah dan bagaimana kandidat tersebut dapat membangun sebuah komunikasi yang baik dengan masyarakat. Field (2003) juga menyatakan akumulasi sumber daya manusia yang berada pada pihak suatu

kandidat atau kelompok yang mendukung kandidat tertentu merupakan salah satu penjelasan lebih lanjut dari modal sosial yang perlu dimiliki oleh kandidat di dalam kontestasi politik. Penjelasan lain yang mengatakan bahwa modal sosial itu mencakup terbentuknya kepercayaan dari masyarakat dan juga norma-norma yang berkembang di dalam masyarakat. Modal sosial menurut Fukuyama (1999) menyatakan bahwa modal sosial merupakan modal yang paling utama di dalam struktur masyarakat karena modal sosial memegang peranan dalam pembangunan kehidupan masyarakat modern karena mencakup beberapa aspek seperti *human development*, *economy development*, kestabilan demokrasi, sosial dan politik. Modal sosial dapat didefinisikan sebagai modal yang berada di tengah masyarakat dan juga berkembang dari masyarakat yang mana masyarakat sendiri merupakan bagian dari modal sosial tersebut. Pada saat sebuah kontestasi pemilihan umum berlangsung, maka para calon yang bermain di dalam kontestasi memerlukan sebuah modal utama yang kuat. Apabila seorang calon mempunyai modal yang lebih dari satu modal, maka peluang calon tersebut untuk memenangkan kontestasi tersebut menjadi lebih tinggi.

### **Strategi Politik dan Peluang Keterpilihan Petahana**

Strategi politik merupakan upaya yang dilakukan oleh para petahana hingga kini yang masih duduk dalam kursi pemerintahan. Keterpilihan petahana merupakan sebuah strategi lanjutan dari strategi politik yang menghasilkan terpilihnya kembali para petahana ketika berkontestasi pada pemilu. Strategi keterpilihan petahana dapat didefinisikan sebagai rencana atau teknik yang secara

umum dilakukan oleh para kandidat petahana dalam kontesasi politik yang bertujuan untuk dapat terpilih kembali pada periode berikutnya dengan memanfaatkan jabatan politik diikuti oleh peninjauan terhadap kondisi masyarakat yang terkait (Muzadi dan Fitriyah, 2020). Teori mengenai strategi keterpilihan petahana seperti yang diungkapkan oleh Sheth dan Frazier (1982) mengatakan terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh kandidat petahana untuk memenangkan kembali kursinya pada periode selanjutnya, antara lain:

1. Proses penguatan
2. Proses bujukan
3. Proses rasionalisasi
4. Proses konfrontasi

Proses penguatan merupakan salah satu rangkaian yang dilakukan untuk memenangkan kembali kursi para petahana pada periode berikutnya dengan mempertahankan seseorang melalui penunjukan sikap-sikap yang positif, proses bujukan merupakan upaya membujuk orang dengan tujuan mengubah sikap negatif menjadi positif, proses rasionalisasi merupakan satu tahapan untuk menjadikan sikap positif menjadi lebih kuat daripada sebelumnya, dan proses konfrontasi merupakan cara untuk mengubah perilaku yang berkembang di tengah masyarakat secara luas (Muzadi dan Fitriyah, 2020).

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Peneliti menganalisis perihal bagaimana strategi modalitas dikapitalisasi dalam merawat konstituen sehingga Sri Marnyuni terpilih selama tiga periode di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yakni reduksi data,

penyajian data, pengambilan keputusan dan verifikasi, serta penarikan kesimpulan.

Subjek penelitian merupakan narasumber atau informan yang dapat memberikan informasi perihal situasi serta kondisi latar yang akan diteliti. Subjek pada penelitian ini adalah Sri Marnyuni (anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah), Bambang Joyo Supeno (Wakil Ketua DPW PAN Jawa Tengah), Wening Haniah (PDA Aisyiyah), Nunuk (PDA Aisyiyah), Andri Nugraha (Pemilih Sri Marnyuni), Tri Mustika (Pemilih Sri Marnyuni), dan Rufaidah (Pemilih Sri Marnyuni).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kapitalisasi strategi modalitas yang dilakukan Sri Marnyuni yang mendorong keterpilihannya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah selama 3 periode. Sri Marnyuni dalam mengkapitalisasi strategi dan modalitas yang dimiliki, diawali dari proses pencalonan Sri Marnyuni oleh PAN sebagai partai pengusung. PAN memberikan beberapa keuntungan kepada Sri Marnyuni dalam proses pencalonan politik seperti pemberian nomor urut 1 pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014. Nomor urut 1 mempunyai peluang keterpilihan paling tinggi untuk para caleg perempuan (Fitriyah dan Supratiwi, 2022). Persetujuan PAN sebagai partai pengusung Sri Marnyuni dalam menentukan dapil juga menjadi keuntungan yang dimiliki Sri Marnyuni dalam kontestasi politik. Kabupaten Klaten merupakan daerah domisili Sri Marnyuni yang juga menjadi basis massa Sri Marnyuni karena keaktifan Sri Marnyuni di organisasi Aisyiyah Kabupaten Klaten. PAN menentukan Dapil 5 pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 serta dapil 7 pada Pemilu 2019 kepada Sri Marnyuni karena Kabupaten Klaten sebagai basis massa Sri Marnyuni termasuk dalam cakupan wilayah dapil tersebut. Proses pencalonan Sri

Marnyuni yang dilakukan PAN juga turut melihat status kepengurusan partai dan status petahana yang dimiliki Sri Marnyuni. Status kepengurusan partai yang dimiliki Sri Marnyuni dinilai dapat memberikan keuntungan untuk terus memperjuangkan pemberdayaan perempuan. Status petahana yang dimiliki Sri Marnyuni dinilai dapat menjadikan partai untuk terus mempertahankan kursi atau suara serta status petahana dinilai dapat memberikan pengaruh positif kepada caleg bukan petahana untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik di periode selanjutnya.

*Vote buying* merupakan pemberian uang tunai/barang yang diberikan calon kepada para pemilih secara sistematis dengan tujuan para pemilih memberikan balasan berupa suara pada hari pemilihan (Aspinal dan Sukmajati, 2015). Upaya-upaya pemenangan Sri Marnyuni tidak pernah dilakukan dengan pola *vote buying*. PAN sebagai partai pengusung juga turut andil dalam memberikan upaya pemenangan Sri Marnyuni. Perawatan terhadap konstituen dan masyarakat menjadi upaya yang dilakukan dan secara implisit berdampak terhadap pemenangan Sri Marnyuni. Perawatan terhadap konstituen dan masyarakat dapat membentuk jaringan sosial yang mempermudah upaya Sri Marnyuni untuk turun ke *grassroot* yang berdampak terhadap pemberian dukungan dan suara kepada Sri Marnyuni.

Kapitalisasi modal ekonomi yang dilakukan Sri Marnyuni banyak dialokasikan untuk kebutuhan perawatan konstituen bukan memaksimalkan kebutuhan kampanye politik. Alokasi modal ekonomi yang digunakan Sri Marnyuni untuk kebutuhan perawatan konstituen bersifat *public goods* karena dapat memberikan manfaat kepada

masyarakat. Pengelolaan modal ekonomi lainnya oleh Sri Marnyuni juga membentuk patronase. Patronase merupakan pemberian berupa uang, barang atau jasa lain yang menguntungkan perseorangan atau kelompok (Aspinal dan Sukmajati, 2015). Pembagian sembako kepada masyarakat di lingkungan sekitar Sri Marnyuni yang berasal dari modal pribadi Sri Marnyuni merupakan bentuk patronase yang terbangun dalam penggunaan modal ekonomi. Pola *programmatic politics* yakni pemberian materi sesuai sasaran pemerintah juga dilakukan Sri Marnyuni dengan upaya penurunan program pembagian sembako dari pemerintah oleh Sri Marnyuni untuk masyarakat. Pemberian *infaq* yang dilakukan Sri Marnyuni juga merupakan praktik politik uang yang dilakukan Sri Marnyuni dengan tujuan merawat konstituen yang dimiliki Sri Marnyuni. Pemberian *infaq* juga didasari atas latar belakang agama Sri Marnyuni yang kuat. Hubungan patron-klien yang terbentuk pada kasus keterpilihan Sri Marnyuni berupa patronase bersifat *public goods* dan *programmatic politics*.

Modal ekonomi yang dikeluarkan Sri Marnyuni terbilang cukup besar dalam melakukan perawatan terhadap konstituen dan masyarakat. Pada tabel 3.1 tertulis biaya konsumsi *snack* yang dikeluarkan Sri Marnyuni sebesar Rp 500.000/sekali acara pengajian. Acara pengajian yang dilakukan Sri Marnyuni tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali, namun berkelanjutan. Asumsi acara pengajian yang diselenggarakan Sri Marnyuni dalam sebulan sebanyak 8 kali, maka Sri Marnyuni menyelenggarakan acara pengajian sebanyak 96 kali dalam satu tahun. Total biaya yang dikeluarkan untuk biaya konsumsi *snack* acara pengajian selama setahun sebesar Rp 48 Juta. Nominal tersebut termasuk besar

pengeluarannya untuk merawat konstituen, namun jika dibandingkan dengan nominal yang dikeluarkan caleg lain dengan melakukan praktik *vote buying* seperti yang terlampir pada tabel 3.1 rentangan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 1,2-5 Miliar, maka biaya yang dikeluarkan Sri Marnyuni tidak sebanding dengan caleg lain yang melakukan praktik *vote buying* untuk memenangkan kontestasi politik. Pengeluaran modal ekonomi yang dilakukan Sri Marnyuni juga dipergunakan untuk biaya kompensasi terhadap para caleg PAN satu Dapil yang jumlah suaranya kalah dari Sri Marnyuni.

Modal budaya yang dimiliki Sri Marnyuni menjadi modalitas selanjutnya yang dimiliki Sri Marnyuni. Aspek gaya bicara dan sikap perilaku menjadi modal budaya yang paling berpengaruh terhadap keterpilihan Sri Marnyuni. Pribadi Sri Marnyuni dinilai sebagai pribadi yang positif dan sosok yang mempunyai *akhlak* yang baik. Berdasarkan tabel 3.4 terdapat beberapa uraian mengenai gaya bicara, sikap dan perilaku Sri Marnyuni sebagai anggota dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pribadi dan *akhlak* yang dibawa Sri Marnyuni menjadi faktor keterpilihan paling kuat karena masyarakat dan konstituen menganggap bahwa Sri Marnyuni merupakan anggota dewan yang dinilai tulus dalam menjalankan amanah sebagai dewan dan berpihak kepada masyarakat dengan kerja nyata yang dibuktikan oleh Sri Marnyuni. Pribadi dan *akhlak* yang dibawa Sri Marnyuni merupakan salah satu upaya dalam mengkapitalisasi proses konfrontasi dalam strategi keterpilihan petahana. Dengan menunjukkan pribadi dan *akhlak* yang baik maka hal tersebut dapat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat secara luas dalam melihat sosok Sri Marnyuni sebagai

anggota dewan. Proses konfrontasi yang dilakukan Sri Marnyuni tidak pernah dilakukan dengan ajakan dalam praktik *services and activities*. Latar belakang keluarga menjadi modal budaya Sri Marnyuni selanjutnya yang berpengaruh terhadap keterpilihannya. Keluarga Sri Marnyuni merupakan sosok keluarga yang suportif terhadap karir politik Sri Marnyuni, sehingga kinerja Sri Marnyuni dapat terus terjaga konsistensinya yang dapat berdampak terhadap dukungan dari konstituen dan masyarakat. Latar belakang keluarga dapat juga menjadi cerminan pribadi dan *akhlak* yang dibawa Sri Marnyuni bukan sekedar ‘pencitraan’ terhadap publik. Status sosial dan status petahana menjadi modal budaya selanjutnya yang menjadi faktor keterpilihan Sri Marnyuni.

Status sosial yang dimiliki Sri Marnyuni dinilai mengenalkan sosok Sri Marnyuni di mata publik, terutama masyarakat yang ada di lingkungan agama dan pendidikan, karena adanya *background* profesi guru dan keaktifan Sri Marnyuni dalam mengisi acara-acara pengajian. Proses bujukan dalam strategi keterpilihan petahana dapat terlaksana melalui upaya Sri Marnyuni dalam mengisi acara pengajian-pengajian. Pengajian atau dakwah dapat menjadi sarana untuk mensosialisasikan program dan bentuk komunikasi yang terbangun tidak bersifat memaksa (Safitri, 2020). Komunikasi yang terbangun dalam acara pengajian menjadi sarana Sri Marnyuni melakukan proses bujukan sebagai salah satu strategi keterpilihan petahana. Sosok Sri Marnyuni sebagai anggota dewan yang dinilai mempunyai kinerja baik dan loyalitas Sri Marnyuni terhadap partai juga menjadi nilai tambah yang dipertimbangkan pemilih dalam melihat modal budaya yang dimiliki Sri

Marnyuni. Loyalitas Sri Marnyuni terhadap partai politik membangun proses rasionalisasi dalam strategi keterpilihan petahana. Sri Marnyuni dinilai mempunyai hubungan kerja sama yang baik dengan PAN sebagai partai pengusung menumbuhkan keyakinan dari para pemilih terhadap Sri Marnyuni sebagai anggota legislatif, karena melihat banyak anggota legislatif yang dengan mudah berganti partai untuk mendongkrak suara pada kontestasi selanjutnya. Calon legislatif atau anggota legislatif yang sering berganti partai menunjukkan bahwa orang tersebut terjun ke dalam dunia politik hanya mencari suara dan kemenangan. Status petahana yang dimiliki Sri Marnyuni juga menjadi modal budaya yang berpengaruh terhadap keterpilihan Sri Marnyuni, karena status petahana tersebut dapat mengenalkan nama Sri Marnyuni di mata publik. Masyarakat cenderung memilih caleg yang sudah dikenal atau pernah dikenal daripada memilih caleg yang belum dikenal. Pada kasus Sri Marnyuni, namanya sudah dikenal di mata masyarakat dan menunjukkan kinerja yang baik selama menjabat sebagai anggota dewan. Hal tersebut menjadi bekal para pemilih dalam memilih Sri Marnyuni. Peneliti menilai gelar akademis dan latar belakang pendidikan Sri Marnyuni tidak memberikan pengaruh besar terhadap keterpilihannya di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Gelar akademis dan latar belakang pendidikan dinilai bersifat subjektif, namun adanya latar belakang pendidikan menjadi bukti bahwa Sri Marnyuni pernah duduk di dunia pendidikan. Keterlibatan Sri Marnyuni yang aktif dalam berorganisasi sejak duduk di dunia pendidikan menjadi pengalaman yang dimiliki Sri Marnyuni yang berdampak terhadap kinerja baik yang

ditunjukkan Sri Marnyuni sebagai anggota dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Pengalaman yang dimiliki Sri Marnyuni menjadi aspek yang membentuk kepribadian yang dibawa Sri Marnyuni. Pengalaman menjadi guru, aktivis dan ustadzah yang menumbuhkan daya juang dan daya tangguh dari Sri Marnyuni. Daya juang dan daya tangguh yang dimiliki menumbuhkan pribadi-pribadi yang positif di hadapan publik. Kemampuan mudah beradaptasi yang dimiliki menumbuhkan daya lentur dan pribadi-pribadi yang positif di hadapan publik.

Kapitalisasi modalitas juga dilakukan Sri Marnyuni terhadap modal sosial yang dimilikinya. Kepercayaan masyarakat menjadi bentuk modal sosial yang dimiliki Sri Marnyuni. Masyarakat dapat menaruh kepercayaan terhadap Sri Marnyuni karena upaya-upaya yang dilakukan Sri Marnyuni dalam merawat konstituen. Penyaluran program kepada masyarakat, pemberian pelatihan, penyelenggaraan acara pengajian atau mengisi acara pengajian dan pemberian bantuan kepada masyarakat merupakan upaya-upaya yang dilakukan Sri Marnyuni yang dapat menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat. Upaya tersebut juga termasuk bentuk proses penguatan dalam strategi keterpilihan petahana. Perawatan terhadap konstituen berdampak terpelihara dan terjaga dukungan yang berasal dari konstituen. Reses dan sosialisasi juga menjadi salah satu sarana Sri Marnyuni dalam proses penguatan untuk menjaga dukungan. Upaya Sri Marnyuni yang terlibat aktif dengan mendatangi setiap program atau kegiatan yang diselenggarakan kepada masyarakat membentuk proses rasionalisasi dalam strategi keterpilihan petahana yang berdampak terhadap keyakinan para

pemilih yang semakin meningkat dalam mendukung Sri Marnyuni. Sosok Sri Marnyuni yang turut hadir di tengah masyarakat dengan mendatangi program atau kegiatan yang diselenggarakan menjadikan masyarakat merasa bahwa Sri Marnyuni sebagai anggota dewan turut mendampingi masyarakat sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Sri Marnyuni.

Upaya Sri Marnyuni dalam mengkapitalisasi modal sosial juga didukung latar belakang organisasi sebagai basis massa yang dimiliki, yakni Aisyiyah. Aisyiyah merupakan organisasi perempuan milik Muhammadiyah. Muhammadiyah – Aisyiyah merupakan Organisasi Islam yang berkembang di kawasan-kawasan urban. Muhammadiyah – Aisyiyah juga mempunyai sekolah-sekolah untuk menampung dan mendidik ilmu, *akhlak* dan pribadi generasi-generasi muda. Model pembelajaran yang dilakukan di sekolah-sekolah milik Muhammadiyah – Aisyiyah bertujuan untuk melahirkan generasi ‘ulama-intelektual’ atau ‘intelektual-ulama’ (Rusydi, 2016). Upaya-upaya Sri Marnyuni dengan memberikan bantuan berupa sosialisasi, pelatihan atau penyaluran program kepada orang-orang yang berasal dari Muhammadiyah – Aisyiyah, maka akan lebih diterima melihat latar belakang masyarakat urban dan pendidikan yang berbasis *akhlak* dan bertujuan melahirkan intelektual. Muhammadiyah – Aisyiyah merupakan organisasi yang terstruktur, sehingga jaringan sosial yang dimiliki Sri Marnyuni juga didorong atas rasa saling percaya antara anggota Muhammadiyah – Aisyiyah satu sama lain.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian bagaimana Sri Marnyuni mengkapitalisasi strategi modalitas dalam merawat konstituen yang berdampak terhadap kemenangan Sri

Marnyuni di Pemilu sehingga menjadi anggota legislatif petahana 3 periode di DPRD Provinsi Jawa Tengah, serta melihat terbentuknya relasi penggunaan strategi keterpilihan petahana dengan modalitas yang dimiliki Sri Marnyuni.

Peneliti menemukan kemenangan 3 periode berturut-turut yang dialami Sri Marnyuni merupakan hasil dari daya juang dan daya tangguh milik Sri Marnyuni. Daya juang dan daya tangguh berasal dari kepribadian yang dibawa Sri Marnyuni. Daya lentur dan pengalaman yang dimiliki Sri Marnyuni menjadi aspek dalam membentuk kepribadian yang dibawa Sri Marnyuni. Kapitalisasi modal sosial menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap keterpilihan Sri Marnyuni di DPRD Provinsi Jawa Tengah selama 3 periode. Modal sosial dapat didefinisikan sebagai modal yang berada di tengah masyarakat dan juga berkembang dari masyarakat yang mana masyarakat sendiri merupakan bagian dari modal sosial tersebut. Kapitalisasi modal sosial dalam bentuk perawatan terhadap konstituen dan masyarakat dapat membentuk jaringan sosial hingga ke akar rumput yang menjadikan dukungan-dukungan yang berasal dari akar rumput dapat terbangun secara alamiah tanpa adanya unsur pemaksaan. Bentuk perawatan terhadap konstituen dan masyarakat berupa pelaksanaan kegiatan pengajian, pengadaan pelatihan, sosialisasi, reses, pemberian bantuan sembako dapat menjadi sarana Sri Marnyuni untuk memperkuat modal sosial yang dimiliki. Kapitalisasi modal sosial yang dilakukan Sri Marnyuni juga dipermudah dengan latar belakang Muhammadiyah – Aisyiyah sebagai organisasi yang solid dan sudah tersusun rapi strukturnya.

Peneliti menemukan unsur modal ekonomi dan modal budaya tidak dapat lepas dari kontestasi politik, melihat kapitalisasi modalitas Sri Marnyuni yang mengutamakan modal sosial juga terdapat modal ekonomi dan modal budaya di dalamnya. Dalam buku yang ditulis oleh Field (1999) menjelaskan bahwa modal ekonomi lebih mengarah pada kekuatan finansial yang dimiliki oleh setiap kandidat yang terjun dalam sebuah kontestasi politik dan menjadi akar dari seluruh modal dalam kontestasi politik. Modal ekonomi digunakan secara selektif dalam aktivitas politik Sri Marnyuni dalam melakukan perawatan terhadap konstituen dan masyarakat.

Modal budaya merupakan salah satu unsur yang melekat dari sosok Sri Marnyuni. Peneliti melihat bahwa kekuatan modal budaya Sri Marnyuni bersumber dari pribadi dan *akhlak* yang ditunjukkan kepada masyarakat. Pribadi dan *akhlak* yang dimiliki Sri Marnyuni ditunjukkan melalui gaya bicara dan sikap perilaku terhadap konstituen dan masyarakat. Masyarakat menilai Sri Marnyuni sebagai sosok teladan yang pantas untuk diberikan dukungan.

Peneliti menemukan adanya keterlibatan pihak lain terhadap keterpilihan Sri Marnyuni di DPRD Provinsi Jawa Tengah, pihak lain tersebut adalah partai politik sebagai mesin politik Sri Marnyuni dan organisasi masyarakat sebagai basis massa Sri Marnyuni. Partai politik terlibat dalam proses pencalonan Sri Marnyuni di dunia politik dengan memberikan prioritas pencalonan atas dasar status petahana dan status kepengurusan partai yang dimiliki Sri Marnyuni. Keuntungan lainnya berupa penempatan dapil yang sesuai domisili dan penentuan nomor urut kecil, sehingga hal tersebut

dapat meningkatkan keterpilihan Sri Marnyuni pada kontestasi politik. Organisasi masyarakat sebagai basis massa Sri Marnyuni terlibat dalam pembentukan jaringan sosial yang dimiliki Sri Marnyuni. Organisasi masyarakat menjadi alat Sri Marnyuni untuk memperluas jaringan massa di akar rumput.

Kapitalisasi strategi keterpilihan petahana yang dilakukan Sri Marnyuni dapat terbangun karena relasi dengan modalitas yang dimiliki. Proses penguatan yang bertujuan untuk mempertahankan dukungan dan proses rasionalisasi yang bertujuan untuk memperkuat dukungan yang sudah ada terbentuk melalui modal sosial yang dimiliki Sri Marnyuni, melalui perawatan terhadap konstituen dan masyarakat. Proses bujukan yang bertujuan untuk mempersuasi seseorang dan proses konfrontasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku yang berkembang di masyarakat terbentuk melalui modal budaya yang dimiliki Sri Marnyuni dengan menunjukkan sikap-sikap yang positif kepada masyarakat, sehingga citra baik di mata masyarakat dapat mengubah suara negatif menjadi positif.

## SARAN

Berikut adalah saran yang diberikan oleh peneliti:

1. Bagi caleg perempuan disarankan memanfaatkan penggunaan modal ekonomi untuk membangun jaringan sosial sehingga dapat terbentuk modal sosial yang kuat dengan diikuti pembawaan modal budaya yang baik di mata masyarakat.
2. Bagi partai politik disarankan memberikan perhatian lebih kepada caleg perempuan dengan memberikan nomor urut kecil sehingga caleg perempuan mendapatkan peluang keterpilihan yang lebih tinggi.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan meneruskan penelitian ini menggunakan metode lain seperti kuantitatif atau mix method, sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih luas, lebih variatif dan mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aspinal, Edward dan Mada Sukmajati. 2015. *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientilisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Bourdieu, Pierre. 1986. "The Forms of Capital." Pp. 241-258 in *Handbook of Theory and Research for The Sociology of Education*. New York: Greenwood Press.
- Dalo, Ishak Supatriot, Ratnawati. (2010). Modalitas dalam kompetisi elektoral : Studi Kemenangan Hartini Pada Pemilu 2009 di Kabupaten Manggarai. Tesis S2 Ilmu Politik. Diakses dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/48513> tanggal 10 Februari 2023.
- Field, J. (2003). *Modal Sosial (Ter)*. London: Kreasi Wacana.
- Fitriyah dan Supratiwi. 2022. *JALAN PEREMPUAN KE PARLEMEN LOKAL: Pengalaman dari Jawa Tengah*. Magelang: Tidar Media.
- Fitriyah (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik* 11(1): 1-17. DOI: <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17>
- Fitriyah dan Supratiwi (2015). The Electability of Women Candidates in The Election of Central Java DPRD in 2014. *Komunitas International Journal Of Indonesian Society And Culture* 7(1): 157-165. DOI: <https://doi.org/10.15294/komunitas.v7i1.3666>
- Fukuyama, F. 1995. *Trust: Kebijakan Sosial Dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Qalam.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Indira S, Giscka Canna dan Chusnul Maryah (2021). Analisis Modal Politik, Sosial, dan Ekonomi Terhadap Keterpilihan Caleg Perempuan Pemula Pada Pileg DPRD DKI Jakarta 2019. *TheJournalish: Social and Government* 2(2): 56-63. DOI: <https://doi.org/10.55314/tsg.v2i2.142>
- Katz, Richard S., dan William Crotty. 2006. *Handbook of Party Politics*. London: SAGE Publications Ltd.
- Maharani, Rizki dkk. (2020). Modalitas RA. Anita Noeringhati pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2019. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* 12(2): 487-496.

- DOI:  
<https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i2.18501>
- Marijan, Kacung. 2006. *Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Langsung*. Surabaya: Pustaka Eureka dan PusDeHAM
- Matland, Richard E. 2002. "Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan: Rekrutmen Legislatif dan Sistem Pemilihan." *Perempuan di Parlemen: Bukan Sekedar Jumlah*, ditulis Jullie Ballington dan Sakuntala Kadirgamar-Rajasingham, Jakarta: AMEPRO.
- Mellaz, A. 2018. *Personal Vote, Candidate-Centered Politics, dan Pembiayaan Pileg 2014*. Dalam Mada Sukmajati dan Aditya Perdana (Ed.). *Pembiayaan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta: Bawaslu. Hal. 73-95
- Muzadi, Akhmad dan Fitriyah (2020). Kemenangan Hattrick: Strategi Keterpilihan Een Rusmiyati dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kota Cirebon. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5(2): 118-133. DOI: <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8146>
- Pantouw, Stella Maria Ignasia. (2012). Modalitas dalam Kontestasi Politik (Studi tentang Modalitas dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh dan Maximiliaan Lomban pada Pemilu di Kota Bitung Sulawesi Utara tahun 2010). Tesis S2 Ilmu Politik. Diakses dari <http://eprints.undip.ac.id/42173/> tanggal 19 Mei 2023.
- Phillips, Anne. 1995. *The Politics of Presence*. Oxford: Oxford University Press.
- Rusydi, Rajiah (2016). Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha di Bidang Pendidikan, dan Tokoh). *Jurnal Tabawi* 1(2): 139-148. DOI: <https://doi.org/10.26618/jtw.v1i2.367>
- Safitri, Dita Amalia. (2020). Modal Sosial dan Keterpilihan Umi Azizah pada Pilkada Kabupaten Tegal Tahun 2018. Skripsi S1 Ilmu Pemerintahan
- Sheth J., dan Gary L. Frazier (1982). A Model of Strategy Mix Choice for Planned Social Change. *Journal of Marketing*. DOI: [10.1177/002224298204600102](https://doi.org/10.1177/002224298204600102)
- Subono, Nur Iman. 2012. "Pengantar" *Partai Politik dan Strategi Gender Separuh Hati*, diedit oleh A. W. Soetjipto dan S. Adelina. Jakarta: Parentesis.
- Sweinstani, Mouliza K Donna. (2023). "Partai Politik dan Proyeksi Perempuan dalam Pemilu 2024". Artikel. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/02/06/partai-politik-dan-proyeksi-perempuan-dalam-pemilu-2024> tanggal 13 Februari 2023.